

Kekuasaan Dan Wewenang Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan

Shabrina Rizkiyani

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: sabrinarizkiyani4@gmail.com

Saeful Mujab

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: saeful.mujab@dsn.ubharajaya.ac.id

Alamat: Jl. Harsono No. 67 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12550

Korespondensi penulis: sabrinarizkiyani4@gmail.com

Abstract. *This article reviews the differences and relationships between political power and authority from a government system perspective. Political power includes the ability to influence the behavior of others, while political authority relates to the rights or authority granted by law or the constitution. The method used is data collection (library study) with the aim of collecting conceptual information and data from various sources such as journals, books, previous research, as well as various previously published scientific articles. This article reveals how political power and authority have an important interconnected relationship in political decision making. The results provide a deeper understanding of how these two concepts influence the dynamics of government systems.*

Keywords: *Government system, political power, political authority*

Abstrak. Artikel ini mengulas perbedaan dan hubungan keterkaitan antara kekuasaan dan wewenang politik dari perspektif sistem pemerintahan. Kekuasaan politik mencakup kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sementara wewenang politik berkaitan dengan hak atau kewenangan yang diberikan oleh hukum atau konstitusi. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data (library study) dengan tujuan mengumpulkan informasi konseptual dan data dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, penelitian terdahulu, serta berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi sebelumnya. Artikel ini mengungkap bagaimana kekuasaan dan wewenang politik saling mempunyai hubungan keterkaitan yang penting dalam pengambilan keputusan politik. Hasilnya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua konsep ini memengaruhi dinamika sistem pemerintahan.

Kata kunci: Kekuasaan politik, sistem pemerintahan, wewenang politik

PENDAHULUAN

Dalam sejarah dan evolusi manusia, kekuasaan dan wewenang politik telah menjadi unsur kritis dalam pembentukan dan pengorganisasian masyarakat. Kekuasaan dan wewenang politik adalah dua elemen kunci yang membangun landasan dasar bagi sistem politik suatu negara. Adanya kekuasaan tergantung pada korelasi penghubung pihak yang berkuasa dan pihak yang menguasai; dengan kata lain pihak yang dapat memberikan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh tersebut, baik secara sukarela maupun dengan paksaan. Ketika kekuasaan berpindah kepada seseorang, orang tersebut biasa disebut pemimpin dan orang yang dipengaruhi olehnya disebut pengikutnya.

Perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan (otoritas atau kekuasaan yang disahkan), misalnya kekuasaan yang ada pada diri seseorang atau sekelompok orang dan mendapat dukungan atau pengakuan dari masyarakat karena memerlukan pengakuan dari masyarakat itu sendiri. Sedangkan jika wewenang biasanya terbatas dalam hal cangkupan, waktu dan cara menggunakan kekuasaannya. Kekuasaan hanya efektif jika didukung oleh kekuasaan yang nyata, namun kedudukan kekuasaan dalam pandangan masyarakat dan basis kekuasaan yang sebenarnya seringkali tidak berada pada tempat atau pada satu tangan yang sama. Konteks penelitian ini penting karena dinamika politik yang selalu berubah dan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Perubahan teknologi, globalisasi, dan tuntutan sosial akan partisipasi politik yang lebih besar semakin menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai kekuasaan dan wewenang politik. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis secara kritis literatur yang ada dan merumuskan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman konsep.

Pemahaman yang lebih baik mengenai kekuasaan dan otoritas politik memungkinkan pemerintah merancang kebijakan yang lebih efektif, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat sistem demokrasi.

Yukl menyatakan bahwa kemampuan di satu sisi mempengaruhi sikap dan perilaku orang ke arah yang diinginkan (Gary Yukl, 1996). Sedangkan Robbins berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan suatu pihak untuk mempengaruhi pihak lain. Sementara Robert Bierdstedt menyatakan, kewenangan disimbolkan kekuasaan yang dilambangkan, dan Harl D. Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa wewenang adalah kekuasaan formal.

Penelitian sebelumnya telah memberikan pemahaman mendalam tentang perbedaan antara kekuasaan dan wewenang politik, serta dampaknya dalam konteks politik yang berbeda. Studi-studi ini telah menyoroti kompleksitas hubungan antara kedua konsep ini dan perannya dalam membentuk struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan politik. Namun, masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut, dengan berkembangnya dinamika politik kontemporer.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara kekuasaan dan wewenang politik, dalam konteks sistem pemerintahan. Melalui analisis kritis literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman untuk mengidentifikasi implikasi praktisnya terhadap kebijakan publik dan politik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para kebijakan, akademisi, dan praktisi politik mengenai pentingnya pemahaman yang tepat tentang kekuasaan dan wewenang politik dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang demokratis.

KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan.

A. Teori Pemisahan Kekuasaan

Suatu gagasan untuk memisahkan fungsi dan lembaga negara terpisah antara beberapa bagian yang menjalankan hukum secara mandiri dengan menentukan fungsi, tugas dan wewenang sendiri. Teori ini dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu yang merupakan seorang pemikir besar asal Inggris dan juga Perancis. Konsep pemisahan kekuasaan ini yang kemudian dikenal sebagai *Teori Trias Politica*. Menurut Montesquieu membedakan masalah pemisahan kekuasaan dalam tiga bagian:

- 1) Kekuasaan legislatif, membuat Undang-Undang
- 2) Kekuasaan eksekutif, menyelenggarakan Undang-Undang (mengutamakan dibidang politik luar negeri)
- 3) Kekuasaan federatif, mengadili atas pelanggaran Undang-Undang

Sementara John Locke membagi kekuasaan menjadi:

- a) Kekuasaan legislatif, tugasnya membuat peraturan dan Undang-Undang
- b) Kekuasaan eksekutif, tugasnya melaksanakan Undang-Undang yang ada didalamnya untuk mengadili termasuk dengan kekuasaan.
- c) Kekuasaan federatif, tugasnya segala tindakan menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain.

Dua pendapat tersebut adalah perbedaan pemikiran Montesquieu dengan John Locke. Montesquieu memandang bahwa kekuasaan (yudikatif) sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri sementara John Locke meletakkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif.

B. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kekuasaan legislatif atau bisa dari kekuasaan administratif. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang artinya sebagai hal berwenang, hal dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu dan terdapat wewenang-wewenang didalam kewenangan. Tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah dalam lingkup tindakan hukum publik saja tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata wewenang sama dengan kata kewenangan yang diartikan hak dan kekuasaan untuk

bertindak. Selain itu menurut H.D Stoud pengertian wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum publik. dalam hukum publik. Teori dari kewenangan ini digunakan sebagai landasan dalam teori penulisan pada artikel ini karena dalam tugas pelaksanaannya tidak bisa lepas dari teori kewenangan yang terdapat tentang jenis dan sumber kewenangan.

METODE PENELITIAN

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), metode adalah suatu cara kerja dengan suatu sistem yang memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Metode penelitian adalah metode ilmiah yang mengumpulkan informasi untuk tujuan tertentu dan digunakan melalui serangkaian penelitian yang dirancang untuk menjawab permasalahan yang muncul. Data yang diperoleh selama penelitian merupakan data empiris (observasi) dengan kriteria valid.

Penelitian ini menggunakan metode (library study) atau penelitian kepustakaan yang disebut pengumpulan data. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi konseptual dan data dari berbagai sumber seperti majalah, buku, penelitian terdahulu dan berbagai artikel ilmiah yang telah diterbitkan sebelumnya. Menurut Khatibah (2011:38), penelitian kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data dengan menggunakan metode tertentu untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Sebelum peneliti berkonsultasi dengan bahan pustaka, mereka harus mengetahui secara pasti dari sumber mana informasi ilmiah itu diperoleh. Beberapa sumber yang digunakan adalah mis. buku teks, jurnal ilmiah, tesis, tesis dan sumber lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan

Kekuasaan berasal dari kata "kuasa" yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan sendiri memegang peranan penting dalam politik, karena tanpa kekuasaan dalam politik negara akan terjadi suatu negara yang kacau dan tidak harmonis karena tidak adanya aturan yang jelas. Oleh karena itu, kekuasaan sangat penting dalam politik. Kekuasaan didefinisikan sebagai “kemampuan individu untuk mencapai tujuan melalui interaksi dengan orang lain, bahkan ketika menghadapi pertentangan.

Aspek terpenting dari kekuasaan adalah ketergantungan atau keandalan. Jika kita mempunyai sesuatu yang dapat kita kendalikan dan kita membutuhkan orang lain, kita membuat mereka bergantung pada kita dan menguasai mereka dalam bidang tersebut.

Ketergantungan meningkat ketika sumber daya yang kita kendalikan bersifat esensial (*penting*), jarang (*kelangkaan*), dan tidak tergantikan.

Menurut John R. Schemerhorn et.al. (1987: 131) mendefinisikan kekuasaan sebagai “kemampuan yang mampu membuat orang melakukan apa yang kita ingin atau kemampuan untuk membuat hal menjadi kenyataan menurut cara yang kita inginkan.” Kekuasaan biasanya dikaitkan dengan konsep kepemimpinan, di mana kepemimpinan merupakan mekanisme kunci dari kekuasaan guna memungkinkan suatu hal terjadi. Robbins dan Judge, (2011:454) memberikan pengertian bahwa kekuasaan menunjukkan pada kapasitas bahwa A harus mempengaruhi perilaku B, sehingga B bertindak menurut harapan A. Aspek pagar penting dari kekuasaan adalah fungsi *ketergantungan* (ketergantungan). Semakin besar B bergantung pada A, maka semakin besar kekuasaan A dalam hubungan tersebut.

Oleh karena itu, kekuatan atau kekuasaan pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai kesanggupan seseorang dalam membujuk, mempengaruhi, dan membuat orang lain bergantung, rela membuat orang lain melakukan apa yang diinginkannya.

Saluran saluran kekuasaan

Menurut Soerjono Soekanto, kekuasaan mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu:

- 1) Rasa takut, mengarah kepada takut dengan seseorang (Penguasa) yang mendasari kepatuhan pada kemauan supaya tindak mendapat (reaksi negatif).
- 2) Rasa cinta, perasaan yang tumbuh kepada seseorang (Penguasa) yang tindakannya berasal dari kemauan sendiri orang tersebut mendapat (reaksi positif).
- 3) Kepercayaan, karena seseorang mempercayai orang lain dan dengan tanpa ragu menyerahkan kekuasaan kepada orang tersebut.
- 4) Pemujaan, penguasa yang ditempatkan sebagai kelompok untuk dipuja (Nasdian, 2015:218).

Sumber sumber kekuasaan

Menurut John Brench dan Bertram Raven ada 5 sumber kekuasaan, yaitu:

- 1) Kekuasaan menghargai, didasarkan pada kemampuan seseorang yang menguasai untuk memberi dan diberikan pada orang lain untuk melaksanakan perintah.
- 2) Kekuatan memaksa, seseorang yang menghukum orang jika mempengaruhi dan tidak memenuhi perintah dari persyaratan yang ada.
- 3) Kekuasaan sah, seseorang yang diperoleh langsung berdasarkan hukum atau aturan bahwa pemberi pengaruh berhak menggunakannya sampai batas tertentu.
- 4) Kekuasaan keahlian, keyakinan bahwa pengaruh mempunyai keahlian dan pengetahuan yang khusus.

- 5) Kekuasaan referensi, seseorang atau kelompok yang didasarkan yang diidentifikasi pengaruh yang menjadi contoh atau panutan bagi yang terpengaruh.

Jenis kekuasaan

Menurut French and Raven, (Douglas Fairholm Gilbert W. Fairholm (1987: 117) ada beberapa jenis kekuasaan yang diaplikasikan hingga saat ini:

- 1) *Reward power*, kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan seseorang yang menyediakan keuntungan bagi orang lain. Contohnya: Mereka biasanya punya akses pada material, informasi atau upah psikologis (senyum, perhatian, pujian, kata-kata manis).
- 2) *Coercive power*, kekuasaan yang didasarkan atas kemampuan seseorang menyediakan dampak hukuman pada target akibat ketidakpatuhannya. Contohnya: pemimpin mempengaruhi perilaku orang lain akibat kemampuannya menerapkan hasil yang tidak diinginkan.
- 3) *Expert power*, kekuasaan yang didasarkan kemampuan dan pengetahuan khusus yang dimiliki seseorang di mana target atau orang lain kerap menggunakan atau bergantung kepadanya. Contohnya: dengan menerapkan kekuasaan reward kepada atasannya dengan cara menerapkan energi dan skill kemudian kemampuan yang dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain guna menyelesaikan pekerjaan.
- 4) *Legitimate power*, kekuasaan yang didasarkan atas perasaan orang lain bahwa pelaku kekuasaan punya otoritas dan hak untuk mempengaruhi tindakan mereka. Contohnya: hak seseorang memaksakan kepatuhan pada mereka yang menyatakan wajib untuk mentaati sumber kekuasaan (organisasi).

Cara Mempertahankan Kekuasaan

Seseorang atau kelompok yang memiliki kekuasaan menyadari kewajibannya dan hak istimewa mereka. Mereka sadar bahwa kekuasaan bisa hilang, sehingga mereka berusaha mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara untuk kepentingan mereka. Untuk tujuan itu ditempuh beberapa cara agar kekuasaan itu dipertahankan, yaitu melalui:

- 1) Menghapus peraturan-peraturan lama, khususnya di bidang politik, yang dipandang merugikan penguasa; menggantinya dengan peraturan baru yang menguntungkan penguasa. Hal ini biasanya terjadi pada saat peralihan kekuasaan dari satu penguasa ke penguasa lainnya.
- 2) Menyelenggarakan administrasi dan birokrasi yang baik, yang dianggap lebih memudahkan kehidupan orang banyak.

Wewenang

Kata wewenang berasal dari kata dasar yang diartikan sebagai hal benar, benar dan kekuasaan yang dipunya untuk melakukan sesuatu. Kewenangan itulah yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Suatu otoritas biasanya terdiri dari beberapa kekuasaan, baik atas sekelompok orang tertentu atau atas suatu wilayah pemerintahan. Wewenang, sebagai kontrol dan legitimasi terhadap kekuasaan, menjadi elemen kritis dalam pembahasan ini. Melalui norma-norma dan hukum, wewenang menciptakan batas dan aturan main yang mengarahkan penggunaan kekuasaan agar sesuai dengan keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut R. C. Davis dalam bukunya, *Fundamentals of Management*, dijelaskan bahwa wewenang adalah hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/ kewajiban tertentu. Dengan demikian wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas perusahaan. Tanpa wewenang orang-orang dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa. Selanjutnya G.R Terry, mengungkapkan wewenang adalah kekuasaan resmi untuk pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang tersebut.

Peran Wewenang dalam Menjaga Ketertiban Sosial, Menegakkan Hukum dan Mengatur Kehidupan Masyarakat

Wewenang mempunyai peran krusial dalam menjaga ketertiban sosial, menegakkan hukum, dan mengatur kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Lembaga pemerintahan dan otoritas berperan penting dalam memberikan arahan dan aturan yang mengatur perilaku masyarakat. Contohnya, di tingkat lokal wewenang otoritas Kepolisian memiliki peran dalam menjaga ketertiban sosial. Bertanggung jawab untuk merespon gangguan ketertiban, melindungi Masyarakat dari kejahatan, dan menegakkan hukum seperti patroli polisi di lingkungan yang rawan kejahatan dapat menciptakan rasa aman bagi warga dan mencegah potensi tindak criminal. Pemerintah sebagai wewenang tertinggi, dapat membentuk regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti Pendidikan, Kesehatan dan lingkungan. Contohnya, regulasi yang menetapkan standar keselamatan di tempat kerja adalah upaya untuk mengatur kehidupan masyarakat demi kebaikan bersama.

Dampak-dampak Wewenang terhadap Pembangunan Politik, Ekonomi, dan Sosial

Dampak wewenang pada Pembangunan politik, ekonomi dan sosial sangat signifikan. Dalam politik, wewenang pemerintah mempengaruhi pembentukan kebijakan, pelaksanaan demokrasi, dan stabilitas politik suatu negara. Secara ekonomi, kebijakan yang dihasilkan oleh

wewenang pemerintah seperti regulasi ekonomi dan perpajakan memberikan dampak langsung pada kegiatan investasi dan kegiatan bisnis. Contohnya, kebijakan fiskal merangsang pertumbuhan ekonomi sementara regulasi yang berlebihan dapat membatasi daya saing ekonomi. Pada aspek sosial melibatkan pemberdayaan Masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi keadilan sosial. Kemudian kebijakan Pendidikan, Kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat mencerminkan pengaruh wewenang dalam membangun struktur sosial.

Hubungan Antara Kekuasaan dan Wewenang Politik Dalam Konteks Sistem Pemerintahan

Hubungan antara kekuasaan dan wewenang merupakan aspek sentral dalam politik dan pemerintahan yang memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keduanya saling terkait dan berperan dalam membentuk struktur kekuasaan di suatu negara serta menentukan arah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain, sementara wewenang merupakan otoritas yang sah atau hak untuk bertindak dalam suatu bidang atau wilayah tertentu. Hubungan antara keduanya menjadi jelas ketika wewenang memberikan legitimasi atas penggunaan kekuasaan. Dalam konteks politik, pemerintah memperoleh wewenang dari konstitusi atau hukum untuk menjalankan kekuasaannya. Misalnya, dalam sistem demokratis, wewenang pemerintah berasal dari mandat yang diberikan oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga kekuasaan yang dimiliki pemerintah dianggap sah dan didasarkan pada kepercayaan publik. Namun, hubungan antara kekuasaan dan wewenang tidak selalu harmonis. Terdapat kasus di mana penguasa menggunakan kekuasaannya secara otoriter, tanpa memperhatikan batasan wewenang yang ditetapkan oleh hukum atau konstitusi. Hal ini sering kali menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Di sisi lain, ada juga situasi di mana wewenang yang dimiliki oleh pemerintah terbatas oleh sistem checks and balances, sehingga kekuasaannya menjadi terbatas. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah menjadi lebih terkendali dan dipastikan untuk tidak disalahgunakan. Selain itu, hubungan antara kekuasaan dan wewenang juga memengaruhi pembentukan kebijakan publik. Keputusan politik yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada wewenang yang dimilikinya, namun penggunaan kekuasaan dalam proses pembuatan kebijakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tekanan politik, kepentingan kelompok, atau opini publik.

Dalam konteks global, hubungan antara kekuasaan dan wewenang menjadi semakin kompleks dengan adanya lembaga-lembaga internasional dan kerjasama lintas negara. Negara-negara harus berbagi wewenang mereka untuk menciptakan aturan dan regulasi yang mengatur hubungan internasional, namun penggunaan kekuasaan dalam konteks ini juga dapat menjadi bahan perdebatan dan konflik. Dengan demikian, hubungan antara kekuasaan dan wewenang merupakan bagian integral dari sistem politik dan pemerintahan suatu negara. Memahami dinamika hubungan antara keduanya dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana kekuasaan dipertahankan, digunakan, dan dikendalikan dalam berbagai konteks politik dan sosial.

Namun, terdapat juga potensi konflik antara kekuasaan dan wewenang dalam sistem pemerintahan. Misalnya, terdapat ketegangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pembagian kekuasaan dan wewenang di dalam suatu negara. Kadang-kadang, salah satu cabang pemerintahan dapat mencoba untuk memperluas wewenangnya di luar batas yang telah ditetapkan, yang dapat mengancam keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Selain itu, perubahan politik dan dinamika sosial juga dapat memengaruhi hubungan antara kekuasaan dan wewenang dalam sistem pemerintahan. Perubahan kebijakan atau regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat mencerminkan pergeseran kekuasaan antara berbagai aktor politik, seperti partai politik, kelompok kepentingan, atau individu yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks yang lebih luas, pemahaman yang baik tentang hubungan antara kekuasaan dan wewenang dalam sistem pemerintahan dapat membantu dalam membangun tata kelola yang baik, memperkuat prinsip demokrasi, dan menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan menganalisis dinamika serta implikasi dari hubungan ini dalam upaya memperbaiki dan memperkuat sistem pemerintahan yang ada.

Pemerintahan dan Makna Kekuasaan

Suatu sistem pemerintahan berkaitan dengan suatu sistem politik karena sistem pemerintahan merupakan bagian dari sistem politik. Sri Soemanti dalam Robert Dahl memeperjelas definisikan bahwa sistem politik adalah pelembagaan dari hubungan antara suprastuktur politik seperti (legislatif, eksekutif, yudikatif) dengan infrastuktur politik meliputi (partai politik, golongan kepentingan, golongan penekan, alat komunikasi politik, tokoh politik). Maka jika dikaitkan kembali dengan teori fungsional Gabriel Almond yang dikutip Fred. W. Riggs

“Teori input dan output maka dalam suatu interaksi sistem politik akan terlihat dua sisi yang dominan yaitu interaksi yang bertujuan untuk mencapai kekuasaan atau wewenang, erta dalam suatu negara hukum harus diatur dengan aturan aturan hukum yang dibuat berdasarkan kekuasaan dan kewenangan”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kekuasaan sendiri memegang peranan penting dalam politik, karena tanpa adanya kekuasaan dalam politik negara mungkin bisa menjadi kacau, tidak tertib dan tidak harmonis karna tidak adanya aturan yang jelas. Oleh karena itu, kekuasaan sangat penting dalam politik. Kekuasaan diartikan sebagai “Kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan dalam berinteraksi dengan orang lain, bahkan dalam menghadapi perlawanan dari orang lain. Artinya, kekuasaan juga sebagai pusat dinamika politik.

Dalam hal ini, otoritas sebagai kontrol dan legitimasi kekuasaan, menjadi elemen kunci dalam pembahasan ini. Melalui norma-norma dan hukum, wewenang menciptakan batas dan aturan main yang mengarahkan penggunaan kekuasaan agar sejalan dengan keadilan dan kebutuhan masyarakat, sehingga menjadikannya sebagai pembatas kekuasaan. Kekuasaan dan wewenang, dalam kenyataannya, saling terkait dan melengkapi. Kekuasaan tanpa dasar wewenang dapat menyebabkan penyalahgunaan, dan wewenang tanpa dukungan kekuasaan dapat menjadi hampa. Keduanya berinteraksi membentuk struktur politik yang kompleks, di mana legitimasi, kontrol, dan pengaruh saling berinteraksi.

Memahami sumber kekuasaan dan wewenang adalah kunci untuk menilai keberlanjutan dan keseimbangan suatu sistem mulai dari dukungan masyarakat hingga pengendalian sumber daya, melacak sumber daya ini membantu memahami ketahanan dan kredibilitas kekuasaan. Pemahaman terhadap jenis-jenis kekuasaan dan wewenang membuka cakrawala baru dalam mengeksplorasi politik. Dari kekuasaan formal hingga informal, dari wewenang legal hingga moral, setiap bentuk memiliki kontribusi dan pengaruh tersendiri dalam pengaturan kekuasaan. Mengenali hubungan antara kekuasaan dan jenis wewenang memberikan dasar penting untuk mengevaluasi dan memahami dinamika politik lebih lanjut.

Negara membutuhkan kekuasaan politik untuk menegakkan aturan hukum, melindungi hak-hak individu, dan menjamin pelayanan publik yang efektif. Tanpa kekuasaan politik yang efektif, negara tidak dapat berfungsi dengan baik dan masyarakat tidak dapat merasa aman dan terlindungi. Kurangnya kekuatan politik yang efektif di suatu negara dapat menyebabkan kekacauan, ketidakstabilan, dan anarki. Tanpa kekuasaan politik yang kuat, negara tidak akan mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum, atau mengelola sumber daya secara efektif. Apalagi Jika kekuasaan politik tidak melakukan

wewenangannya dengan baik, dapat terjadi kegagalan dalam memberikan pelayanan publik, pelanggaran hak-hak individu, dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, ketidakstabilan politik, dan kehilangan legitimasi pemerintah. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak sistem politik dan membahayakan stabilitas negara.

Pada bagian ini juga artikel yang penulis buat ini tentu saja akan jauh dari kata sempurna, akan menemukan banyak kesalahan serta kelemahan baik dalam sisi penulisan maupun penyajiannya. Maka dari itu, sangat diharapkan masukan dari para pembaca agar dapat memberikan solusi yang lebih baik di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

- Budiardjo, M. (2017). DASAR-dASAR ILMU POLITIK. Jurnal Sains dan Seni ITS, 6(1).
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1>
- Haboddin, M. (2017). Memahami Kekuasaan Politik. Universitas Brawijaya Press.
- Hartono, D. R. (2016). Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam. Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 1-104.
- Hasdiana, U. (2018). SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. Analytical Biochemistry, 11(1).
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1>
<http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024>
<https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103> <http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Heriyanti, Y. (2020). PENGARUH LEMBAGA LEGISLATIF DAN YUDIKATIF TERHADAP SISTEM POLITIK DI INDONESIA (KAJIAN BUKU ANALISIS SISTEM POLITIK INDONESIA, PENGARANG IKHSAN DARMAWAN). 3, 1-6.
- Jeanne Manik, S. H., & Darc, N. (2013). Kekuasaan dan kepemimpinan sebagai proses sosial dalam bermasyarakat. Jurnal Society, 1(1).
- Lubis, S. (1991). Jenis jenis kekuasaan. 8(5), 55.
- Luthan, S. (2007). Penegakkan Hukum dan Kekuasaan. Jurnal Hukum, 14(2), 166-184.
- Marbun, S. (1996). Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan Dan Otoritas. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 3(6), 28-43. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art4>
- Moeis, D. S. (2008). Struktur Sosial: Kekuasaan, Wewenang dan Kepemimpinan. Buku Ajar Universitas Pendidikan Indonesia, 1-27.

- Muhammad, M., Ramadhani, M., Hartati, A., Ade, J., Putra, O., Amame, R., Santoso, M., Muharam, C. B., Subandi, Y., Sulaiman, S., Wance, M., Suandi, L. A., & Poernomo, J. E. L. (2016). Pengantar Ilmu Politik. 1-23.
- Muiz, A., & Imam Wahjono, S. (2022). Kekuasaan Dan Wewenang Di Ukm. June. <https://www.researchgate.net/publication/361163282>
- Nambo, A. B., & Puluhuluwa, M. R. (2005). Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari sistem politik). MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 21(2), 262-285.
- Nur, S., & Susanto, H. (2020). Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi. Online Administrative Law & Governance Journal, 3(4), 2621-2781.
- Pemerintah, O., & Rahmasari, L. (n.d.). PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH.
- Ritaudin, S., Negara, K., Pandangan, M., Ikwanul, P., Pemikiran, K., Sistem, T., Indonesia, D., Kepada, D., Penelitian, L., Pengabdian, D., Masyarakat, K., Raden, I., Lampung, I., Dari, D., Penelitian, D., & Tahun, D. (2013). 132628-ID-kekuasaan-negara-dan-kekuasaan-pemerinta.
- Rusdiana, A., & Rahtikawati, Y. (2021). Bahan Ajar Organisasi Lembaga Pendidikan.
- Sastrini, L. K. A. M., & Dewi, N. M. W. (2024). Peranan Peraturan Kebijakan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 214-223.
- Sumirah, D. (2021). Pengantar Manajemen Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab & Delegasi. 90500121003.
- Triyono, W. A., & Toni, A. (2020). Jurnal Pewarta Indonesia. Susiwyaty Chandra¹, Gracia Rachmi Adiarsi², 2(1), 113-120.